

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Putus sekolah bukanlah persoalan baru di bidang pendidikan dan menjadi isu global. Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) menunjukkan masih adanya permasalahan serius dalam pemerataan layanan pendidikan. Fenomena anak putus sekolah sudah menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan, fenomena tersebut secara umum sering terjadi di Indonesia maupun di Kabupaten Brebes sendiri khususnya. Berdasarkan fenomena tersebut, Ali Imron (2011: 159) berpendapat bahwa anak putus sekolah yaitu anak yang keluar dari sekolah sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum ia lulus. Pada kasus-kasus anak putus sekolah, tidak selamanya dapat dipecahkan. Salah satu penyebab tingginya angka anak putus sekolah pada usia wajib belajar, yaitu adanya kendala pada peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Apabila permasalahan pendidikan tersebut tidak dapat ditangani dengan benar dan sungguh-sungguh, maka akan menyebabkan dampak yang sangat besar dan dapat berimbas terhadap masyarakat sekitar bahkan pada negara.

Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) juga terjadi di Kabupaten Brebes yang menjadi fokus utama penelitian ini. Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten yang cukup luas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah, luas wilayah Kabupaten Brebes mencapai  $1.769,62 \text{ km}^2$ . Berdasarkan pada hasil Sensus Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 menurut Kota/Kabupaten, jumlah penduduk Kabupaten Brebes berjumlah 1.813.594 jiwa. Kabupaten Brebes memiliki 17

Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 292 Desa. Jumlah wilayah yang cukup luas serta jumlah penduduknya yang padat, maka keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi suatu masalah yang terjadi sehingga banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) cukup tinggi di Kabupaten Brebes. Menurut data yang dicatat oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes pada tahun 2018, bahwa tercatat ada 17.420 anak tidak sekolah (ATS) yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Brebes.

**Tabel 1. 1 Sebaran Anak Tidak Sekolah (ATS) menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2018**

| <b>No.</b>   | <b>Kecamatan</b> | <b>Jumlah Anak Tidak Sekolah/Drop out</b> |
|--------------|------------------|---|
| 1.           | Tanjung          | 1.220 ATS                                 |
| 2.           | Bulukamba        | 1.292 ATS                                 |
| 3.           | Wanasari         | 645 ATS                                   |
| 4.           | Brebes           | 760 ATS                                   |
| 5.           | Jatibarang       | 979 ATS                                   |
| 6.           | Songgom          | 670 ATS                                   |
| 7.           | Larangan         | 1.260 ATS                                 |
| 8.           | Sirampong        | 410 ATS                                   |
| 9.           | Tonjong          | 688 ATS                                   |
| 10.          | Paguyangan       | 1.195 ATS                                 |
| 11.          | Bumiayu          | 512 ATS                                   |
| 12.          | Bantarkawung     | 2.035 ATS                                 |
| 13.          | Salem            | 1.017 ATS                                 |
| 14.          | Katangungan      | 1.359 ATS                                 |
| 15.          | Banjarharjo      | 1.153 ATS                                 |
| 16.          | Kersana          | 326 ATS                                   |
| 17.          | Losari           | 1.899 ATS                                 |
| <b>Total</b> |                  | <b>17.420 ATS</b>                         |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah anak tidak sekolah (ATS) menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes pada tahun 2018 sebanyak 17.420 ATS. Kecamatan Bantarkawung merupakan Kecamatan yang jumlah anak

tidak sekolah (ATS) paling banyak, yaitu sebanyak 2.035 anak tidak sekolah (ATS). Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah anak tidak sekolah (ATS) paling sedikit yaitu Kecamatan Kersana sebanyak 326 Anak Tidak Sekolah (ATS). Angka putus sekolah merupakan suatu gambaran tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan serta merupakan gambaran skala anak usia sekolah yang sudah tidak sekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi tersebut banyak disebabkan karena memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga masih banyak dijumpai anak usia sekolah yang rela untuk meninggalkan pendidikan formal. Hal tersebut yang menjadikan angka anak putus sekolah terbilang masih tinggi. Faktor ekonomi dan kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama anak putus sekolah dan kemudian mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Kesulitan dalam ekonomi keluarga membuat orang tua lebih memilih agar anak bekerja daripada sekolah. Selain itu, faktor sosial-budaya juga menjadi penyebab anak putus sekolah. Hal ini dikarenakan adanya persepsi keliru tentang pendidikan pada sebagian masyarakat dan juga sebagian keluarga berpandangan bahwa pendidikan tidak terlalu penting.

Namun, menurut Ketua Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Kabupaten Brebes, Muminah (2018) dalam Muhammad Irsyam Faiz (2018) mengemukakan bahwa faktor-faktor anak tidak sekolah (ATS) yang sering ditemui di Kabupaten Brebes disebabkan oleh faktor malas dengan jumlah 237 anak, faktor ekonomi

dengan jumlah 228 anak, faktor karena ingin bekerja dengan jumlah 175 anak, faktor menikah dengan jumlah 23 anak, dan selebihnya disebabkan oleh faktor lain.

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama di bidang pendidikan dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah anak tidak sekolah (ATS) yang disebabkan oleh tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama di bidang pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Brebes menghadirkan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) merupakan gerakan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan guna memperkuat kepentingan terbaik bagi anak. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yaitu kegiatan yang insiasinya berasal dan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan anak usia sekolah (7–18 tahun) yang sedang tidak sekolah atau putus sekolah agar dapat kembali bersekolah atau belajar di lembaga pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan *The United Nations Children's Fund* (UNICEF) mengembangkan sebuah ide gerakan masif yang terstruktur dan sistematis melalui Tim Kebijakan pada level Kabupaten, dari ranah kebijakan tersebut maka terbentuklah Tim Gerakan Bersekolah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Brebes yang unsurnya meliputi multisektor. Pelaksanaan dan keberhasilan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) tidak bisa hanya dilibatkan dari satu pihak saja, tetapi membutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai sektor.

Prosedur kerja program ini dilakukan dengan cara melalui pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) merupakan awal dari program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), karena data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pemanfaatan data berbasis perencanaan. Cakupan dari data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dapat meliputi pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, perlindungan anak, air dan sanitasi, serta perumahan. Peran dari *Civil Society* seperti Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Organisasi Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), Pendamping Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi bagian terpenting dalam mensukseskan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).

Salah satu aspek yang kerap diperbincangkan dalam kehidupan yaitu pendidikan, terutama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kondisi pendidikan di suatu negara dapat diukur dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di negara tersebut. Secara universal pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Arti penting dalam kesadaran pendidikan dapat menentukan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat untuk masa depan. Pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut bersangkutan dengan UUD NRI 1945 Pasal

27 Ayat 1 yang mengemukakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pendidikan sangat diperlukan guna mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selain itu, pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting sehingga tidak dapat dipisahkan dari persoalan mencerdaskan bangsa. Anak merupakan salah satu aset untuk memajukan bangsa, maka dengan adanya pendidikan anak-anak dilatih dengan berbagai pengetahuan dalam menentukan tujuan untuk dirinya di masa yang akan datang.

Melihat pentingnya peran pendidikan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka pemerintah terus mengupayakan perbaikan di bidang pendidikan dengan menjalankan berbagai program. Salah satu program pemerintah mengenai pendidikan yaitu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024. Berlandaskan pada Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2000 pasal 34 ayat (1–3) menjelaskan bahwa; 1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti wajib belajar. 2) Adanya jaminan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa adanya pungutan biaya. 3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, dan juga masyarakat. Sasaran wajar 12 tahun ini mencakup seluruh warga negara Indonesia khususnya yang berusia 7–18 tahun agar dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Wajib belajar merupakan

program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat terutama dalam pendidikan pada suatu wilayah berdampak pada partisipasi pendidikan. Jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di wilayah tersebut. Selain itu, salah satu cara dalam peningkatan pendidikan untuk mendorong perkembangan pada suatu negara ialah dengan cara meningkatkan partisipasi pendidikannya. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

Indikator dalam keberhasilan program di bidang pendidikan yang dilakukan untuk menghitung partisipasi sekolah terdapat 3 metode, yaitu dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) ialah indikator yang digunakan dalam menentukan penduduk usia sekolah dengan melakukan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu (tanpa melihat ketepatan usia penduduk tersebut) dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka Partisipasi Murni (APM) ialah indikator yang digunakan dalam perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk yang usia sesuai dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

**Tabel 1. 2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Brebes Tahun 2018**

| <b>Jenjang Pendidikan</b> | <b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b> | <b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b> |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SD/MI                     | 98,86                                | 110,13                               |
| SMP/MTs                   | 84,83                                | 88,89                                |
| SMA/SMK/MA                | 49,56                                | 69,29                                |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional, (2018)

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di tingkat sekolah dasar Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 98,86% Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 110,13%, di tingkat sekolah menengah pertama Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 84,83% Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 88,89%, di tingkat sekolah menengah Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 49,56% Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 69,29% (Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018).

Pada Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud 2020–2024 disebutkan bahwa, secara garis besar arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) salah satunya yaitu dalam optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan yaitu: (1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini meningkat; (2) Wajib belajar sembilan tahun tuntas dan wajib belajar dua belas tahun meningkat; dan (3) Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat. Terkait dengan program wajib belajar dua belas tahun, pemerintah telah menyusun beberapa strategi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut, salah satu diantaranya adalah



melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak yang tidak sekolah atau anak berkebutuhan khusus yang dilakukan dengan berbagai langkah. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya yaitu melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) serta pelaksanaan program *retrieval* untuk anak putus sekolah.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dadang Sepuluh dan Agus Suherman (2018) tentang "Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga di Kota Tangerang". Hasil dari penelitian tersebut Tingkat sosial ekonomi keluarga dari jenis pekerjaan 1) pekerjaan sebagai pedagang sebanyak 35,7%, 2) pekerjaan sebagai pemulung 35,7%, 3) pekerjaan sebagai pembantu 14,3%, 4) 11,9% bekerja sebagai buruh pabrik. Penyebab angka putus sekolah di Kota Tangerang adalah: 1) Faktor ekonomi masyarakat yang lemah, 2) Kurangnya usaha dari orang tua dalam membujuk anaknya dalam melanjutkan pendidikan, 3) Kurang meratanya pendataan dari pemerintah setempat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Denny Soetrisnaadisendjaja dan Nurkartika Sari yang dilaksanakan di kawasan industri Kota Cilegon mengenai fenomena anak putus sekolah. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu faktor penyebab anak putus sekolah yakni, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan kondisi fisik anak yang lemah sehingga mempengaruhi daya tahan tubuhnya. Dampak yang dirasakan oleh anak setelah mengalami putus sekolah yaitu anak merasa kecewa dan merasa menyesal karena telah mengecewakan orang tuanya. Pandangan anak putus sekolah mengenai pendidikan yakni, pendidikan sangat penting dengan alasan yang berbeda-beda menurut sudut pandangnya masing-masing.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Anny Istiqomah, Sukidin, dan Pudjo Suharso yang dilakukan di Kabupaten Jember. Penelitian ini mengenai “Analisis Partisipasi Pendidikan pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nagosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember”. Hasil dari penelitian ini yaitu penduduk miskin di Dusun Gumuk Limo Desa Nagosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember berjumlah 92 Kepala Keluarga (KK). Penduduk yang termasuk penduduk usia sekolah berjumlah 95 anak yang diperoleh dari 92 orang responden dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tinggi pada jenjang SD sampai jenjang SMA/SMK. Sedangkan pada Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD sampai SMA/SMK kategori tinggi, dan PT termasuk kategori rendah. Nilai anak menurut responden yang ada di Dusun Gumuk Limo Desa Nagosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yaitu sebagai manfaat ekonomi, jaminan di masa tua, dan untuk meningkatkan status sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “**Dampak Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Partisipasi Bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah**”. Peneliti tertarik dengan topik anak tidak sekolah (ATS) terutama pada program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB), karena peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai partisipasi bersekolah anak putus sekolah dari adanya pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Pada dasarnya identifikasi masalah merupakan suatu upaya untuk menjelaskan suatu permasalahan yang ada atau menentukan apa saja yang menjadi inti dari sebuah penelitian sehingga dapat diukur dan diuji. Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan identifikasi masalah dalam penelitian peneliti. Identifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah?
2. Bagaimana partisipasi bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS) dari adanya program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan bagaimana upaya menghadapi hambatan tersebut?
4. Bagaimana implikasi praktis dan teoritis pekerja sosial dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS)?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pelaksanaan sosialisasi terhadap partisipasi bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

#### **2. Tujuan Khusus**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi bersekolah Anak Tidak Sekolah (ATS) terhadap program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) di Kabupaten Brebes dan bagaimana upaya dalam menghadapi hambatan tersebut.
4. Untuk mendeskripsikan dan menggambarkan implikasi praktis dan teoritis pekerja sosial dalam menangani anak putus sekolah.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis atau praktis yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dampak pelaksanaan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dalam peningkatan partisipasi bersekolah anak putus sekolah di Kabupaten Brebes, sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pelayanan sosial terutama dalam bidang kebijakan pendidikan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial maupun bidang ilmu lainnya. Serta dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengevaluasi keberhasilan program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB).

#### **1.4. Kerangka Konseptual**

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, yang tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. Menurut Elizabeth Wickenden (dalam Friedlander, 1974 :

4) mendefinisikan kesejahteraan sosial, sebagai:

Suatu sistem perundang-undangan, kebijakan, program, pelayanan, dan bantuan; untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial yang dikenal sebagai kebutuhan dasar bagi kesejahteraan manusia dan bagi berfungsinya ketertiban sosial secara lebih baik.

Selain itu, kesejahteraan sosial juga mencakup proses-proses yang secara langsung berkaitan dengan pencegahan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta perbaikan dalam kualitas kehidupan seseorang. Menurut Walter A. Friedlander mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial ialah:

Sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai taraf hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka, selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Dari definisi diatas dapat dimaknai bahwa secara garis besar kesejahteraan sosial berbicara mengenai bagaimana cara untuk memecahkan berbagai masalah-

masalah sosial yang ada di masyarakat dan membantu seseorang agar dapat berfungsi secara sosial, sehingga ia terlepas dari masalah yang dialaminya. Pengertian kesejahteraan sosial juga merujuk pada segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi suatu kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*).

Pekerja sosial merupakan suatu profesi pelayanan kepada manusia baik individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *human relation* (relasi antar manusia). Menurut Walter A. Friedlander dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Social Welfare* (2002) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai:

Pekerjaan sosial sebagai suatu pelayanan profesional yang didasari pada pengetahuan ilmiah dan keterampilan dalam hubungan kemanusiaan yang membantu individu-individu secara perorangan maupun dalam kelompok, guna mencapai kepuasan dan kebebasan sosial dan pribadi.

Pada dasarnya, definisi tersebut memfokuskan bahwa pekerjaan sosial yaitu suatu profesi pelayanan sosial kepada individu, kelompok, serta masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah mengenai relasi manusia, serta bertujuan untuk mencapai kepuasan pribadi, kepuasan sosial, dan kebebasan. Menurut Friedlander, inti dari profesi pekerjaan sosial yaitu relasi atau interaksi antar manusia.

Menurut Allen Pincus dan Anne Minahan, mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai:

Pekerjaan sosial berhubungan dengan interaksi antara orang-orang dan lingkungan sosial, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas

kehidupannya, mengurangi ketegangan, serta mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Menurut Pincus dan Minahan fokus dari pekerjaan sosial sebagaimana dari definisi diatas yaitu interaksi orang dengan lingkungan sosialnya agar mampu menyelesaikan tugas kehidupan mereka, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pekerjaan sosial yaitu suatu aktivitas yang direncanakan guna menghasilkan suatu perubahan; menyangkut interaksi seseorang dengan lingkungan sosialnya; bertujuan untuk membantu seseorang atau institusi sosial agar dengan adanya interaksi sosial tersebut ia dapat menjalankan tugas-tugas kehidupannya dan fungsi sosialnya dengan baik; dapat memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapi; serta mewujudkan aspirasi mereka.

Program pelayanan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yaitu aksi atau tindakan guna mengatasi masalah sosial dengan berbagai program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian pelayanan sosial menurut Fahrudin (2012 : 50) yang dikutip dari Sainsbury (1977), mengemukakan definisi pelayanan sosial secara luas , yaitu:

Pelayanan-pelayanan sosial yaitu suatu pelayanan yang dipergunakan untuk semua (*communal services*) yang berkepentingan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial serta mengurangi masalah-masalah sosial tertentu—khususnya, kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah yang membutuhkan penerimaan publik secara umum atas tanggung jawab sosial dan tergantung dari pengorganisasian hubungan-hubungan sosial dalam melakukan pemecahan masalah.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pelayanan sosial yaitu aksi atau suatu tindakan untuk mengatasi masalah sosial yang dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Ali Imron (2011 : 159) berpendapat dalam bukunya, mendefinisikan anak putus sekolah, yaitu:

Anak yang keluar dari sekolah sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum ia lulus. Maka dapat disimpulkan bahwa anak putus sekolah yaitu anak yang tidak bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, atau telah menyelesaikan tapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya yang dikarenakan berbagai alasan yang mengharuskan anak berhenti sekolah.

Menurut Theoderson (1969) di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi yaitu keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial guna mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Menurut Aswasulasikin (2017 : 65) yang dikutip dari Suryosubroto (2002), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam memberikan gagasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keikutsertaannya.

Partisipasi masyarakat juga dikemukakan oleh Dwiningrum (2011), yaitu partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan di dalam masyarakat lokal.

Dalam hal ini pada penelitian mengenai partisipasi bersekolah merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Berdasarkan paparan definisi-



definisi di atas dapat dimaknai secara umum bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada suatu daerah tertentu, keterlibatan tersebut baik secara mental, emosi, dan fisik anggota masyarakat.

Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) yaitu kegiatan yang insiasinya berasal dan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan anak usia sekolah (7–18 tahun) yang sedang tidak sekolah atau putus sekolah untuk dapat kembali bersekolah atau belajar di lembaga pendidikan formal, non-formal, atau informal.